



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2006

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI,  
DAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pemeriksa Pajak adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pemeriksa Bea dan Cukai adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, diberikan tunjangan Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dan Makanan setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan besarnya tunjangan jabatan fungsional yang telah diterimanya sampai dengan diberikannya tunjangan Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Pemberian tunjangan Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

**Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Pajak, dan Pemeriksa Bea dan Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2006  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 46 Tahun 2006**

**TANGGAL : 26 Mei 2006.**

**TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL**

**PEMERIKSA PAJAK**

| <b>No.</b> | <b>JABATAN FUNGSIONAL</b> | <b>JABATAN</b>                     | <b>BESARNYA TUNJANGAN</b> |
|------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1          | Pemeriksa Pajak Ahli      | Pemeriksa Pajak Madya              | Rp 825.000,00             |
|            |                           | Pemeriksa Pajak Muda               | Rp 550.000,00             |
|            |                           | Pemeriksa Pajak Pertama            | Rp 264.000,00             |
| 2          | Pemeriksa Pajak Terampil  | Pemeriksa Pajak Penyelia           | Rp 495.000,00             |
|            |                           | Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan | Rp 248.000,00             |
|            |                           | Pemeriksa Pajak Pelaksana          | Rp 197.000,00             |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 46 Tahun 2006**

**TANGGAL : 26 Mei 2006.**

**TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL**

**PEMERIKSA BEA DAN CUKAI**

| <b>No.</b> | <b>JABATAN FUNGSIONAL</b>        | <b>JABATAN</b>                             | <b>BESARNYA TUNJANGAN</b> |
|------------|----------------------------------|--|---------------------------|
| 1          | Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli     | Pemeriksa Bea dan Cukai Madya              | Rp 825.000,00             |
|            |                                  | Pemeriksa Bea dan Cukai Muda               | Rp 550.000,00             |
|            |                                  | Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama            | Rp 264.000,00             |
| 2          | Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil | Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia           | Rp 495.000,00             |
|            |                                  | Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan | Rp 248.000,00             |
|            |                                  | Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana          | Rp 197.000,00             |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**LAMPIRAN III**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 46 Tahun 2006**

**TANGGAL : 26 Mei 2006.**

**TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL**

**PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

| <b>No.</b> | <b>JABATAN FUNGSIONAL</b>                | <b>JABATAN</b>  | <b>BESARNYA TUNJANGAN</b>                       |
|------------|--|---|---|
| 1          | Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Ahli     | Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Madya<br>Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Muda<br>Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pertama                    | Rp 825.000,00<br>Rp 550.000,00<br>Rp 264.000,00 |
| 2          | Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Terampil | Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Penyelia<br>Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pelaksana Lanjutan<br>Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pelaksana | Rp 495.000,00<br>Rp 248.000,00<br>Rp 197.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO